

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonom*, Setara Press, Malang.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Press, Ponorogo.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gema Media, Yogyakarta.
- Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta,
- Muhammad Iqbal, 2001, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- _____, 2014, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana Press, Jakarta.

Raco JR, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Richard W. Bauman And Tsvi Kahana (ed), 2006, *The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State*, Cambridge University Press, Cambridge.

Ronny Hanitijio Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta.

Roy Marthen Moonti, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama Keretakupa, Makassar, 2017.

Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta. Cet- 8 Oktober 2008.

Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press.

_____ dan Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Tahir Azhary, 2007, *Negara Hukum*, Cet Kedua, Kencana Press, Jakarta.

The New Oxford Illustrated Dictionary, Oxford University Press.

Jurnal/Internet:

Abd.Salam, "*Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam (Kajian Methodologis Hukum Islam)*", www.badlag.net/artikel/2007, diakses 16 Juli 2021.

Bivitri Susanti, *Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Jentera, Volume 1 No. 2, 2017.

Busroh, Firman Freaddy, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum. Volume 10 No.2, Agustus 2017.

Fery Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Vol. XXI, No. 3, 2016.

- I Wayan Parsa, *Hubungan Pusat dan Daerah (Suatu Pendekatan Teoritis)*, FH Universitas Udayana, Denpasar, 2015.
- Indah Sari, *Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk Negara Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, FH Universitas Suryadarma, Volume 5 No.2, Maret 2015.
- Kamus Hukum Online, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/yuridis/> diakses tanggal 17 April 2021.
- KBBI online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> diakses tanggal 18 April 2021.
- _____, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PERAN>, diakses tanggal 18 April 2021.
- _____, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/RANCANGAN>, diakses tanggal 19 April 2021.
- Khairul Fahmi, *Sentralisasi Pembentukan Perda*, Harian Kompas 21 Oktober 2019, versi elektronik tersedia pada: <https://kompas.id/baca/opini/2019/10/21/sentralisasi-pembentukan-perda/>, diakses tanggal 18 April 2021.
- Kompas.com, *Mahfud MD Apresiasi Ide Jokowi soal Pusat Legislasi Nasional*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/18/13223401/mahfud-md-apresiasi-ide-jokowi-soal-pusat-legislasi-nasional>, diakses 26 Juli 2021.
- Meila Nurhidayati, <https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/>, diakses tanggal 17 April 2021.
- Muhammad Sapta Murti, dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180, diakses tanggal 19 April 2021.
- Muhtarom, *Review Artikel: Kedudukan Peraturan Perundang-undangan Negara dalam Institusi Hukum Islam Karya Drs. H. Abd. Salam*, Suhuf, Vo.27, No. 1, Mei, 2015.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, Jakarta, Oktober 2019.

Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, FH Universitas Sultan Agung, Vol.1 No. 1 Maret 2018.

Saiful Bahri, *Dasar-Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. <http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf>., diakses 27 Juli 2021.

William Robinson, “*How the European Commission drafts legislation in 20 languages*”. Clarity (Journal of the international association promoting plain legal language), No.53, May 2005.

Lain-Lain:

A.Hamid S. Attamimi, *Ilmu Pengetahuan Perundang undangan (Gesetzgebungswissenschaft) Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum*, Makalah dalam Diskusi Mengenai Kemungkinan Masuknya Ilmu Perundang-undangan Dalam Kurikulum Fakultas Hukum pada Penemuan Dekan-dekan Fakultas Hukum Negeri Se-Indonesia Di Bawah Konsorsium Ilmu Hukum, Jakarta, 20-21 Oktober 1989.

_____, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Ahmad Sukarja, *Fikih Siyasa*, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam , Ikhtiar Baru Van hoeve, Vol.3, Jakarta, 2003.

DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor SP DIPA 013.08.2.408747/2021 tanggal 23 November 2020 Program Pembentukan Regulasi Tahun Anggaran 2021.

Iwanuddin Iskandar, “*Teknis Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah*”, paparan pada Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Semarang, 3 Februari 2021.

Laporan Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah tahun 2018, 2019 , dan 2020.

Prosiding, Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) KE – 4, *Penataan Regulasi Di Indonesia*, Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017.

Rekapitulasi Permohonan Fasilitasi Pengharmonisasian Raperda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Periode Januari-Juni 2021.

Rika Marlina, Tesis: *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Prinsip Legalitas (Studi terhadap Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah)*. (Semarang: FH. Unissula, 2018).

Tim Penyusun Naskah Akademik, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Wawancara dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub. Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan beberapa Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Semarang, 11-16 Juli 2021.

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembedaan dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-01.PP.05.01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah No.180/0017890 tanggal 30 Desember 2020 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.

